

Pemkot Berhasil Capai WTP

BERKAT
BERITAKHATULISTIWA

Pontianak, BERKAT.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berhasil mencapai target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2011. Hasil audit ini diterima Walikota Pontianak, H. Sutarmidji, SH, M.Hum, pada Rabu (16/5), di Kantor BPK.

Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Adi Sudibyo, mengatakan, penyerahan tersebut merupakan yang pertama dari 15 entitas di Kalbar yang diperiksa. "Pemeriksaan dilakukan selama tiga puluh hari berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara," kata Adi Sudibyo.

Ia melanjutkan, berdasarkan hal itu, mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Hasilnya, kata dia, BPK RI menyatakan opini WTP dengan paragraf penjelas, yakni Pemerintah Kota Pontianak belum mengelola persediaan barang cetakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara memadai.

Kemudian, belum informatif dalam menyajikan data aset tetap dan menyajikan aset milik pihak lain, serta belum mengelola pendapatan retribusi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara memadai.

"Juga perlu meningkatkan mekanisme pengendalian intern terkait dengan penerimaan pendapatan retribusi persampahan agar tidak terjadi kembali penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah," kata dia.

Adi Sudibyo mengharapkan, agar opini yang diperoleh tidak dijadikan sebagai hal yang euforia untuk dirayakan secara besar-besaran, tetapi menjadi pacuan dan dasar untuk mendorong tata kelola keuangan pemerintah kota yang lebih baik.

"Walikota Pontianak dan jajaran dapat mempertahankan apa yang telah diperoleh, bahkan lebih baik lagi dengan menciptakan pemerintah kota yang lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat menyejahterakan masyarakat Kota Pontianak, dan juga bersama-sama dengan BPKP dapat memicu daerah-daerah lain agar lebih baik," kata Adi Sudibyo.

Sementara itu, Walikota Pontianak, H. Sutarmidji, SH, M.Hum, menyatakan akan segera memperbaiki hal-hal yang menjadi catatan dalam paragraf penjelas.

Ia berharap, seluruh jajaran Pemerintah Kota Pontianak mempunyai tanggung jawab moral untuk mempertahankan dan memperbaiki opini yang diperoleh tersebut.

"Terima kasih kepada BPK, BPKP, dan semua pihak yang telah memberikan arahan sehingga Pemerintah Kota Pontianak dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Sutarmidji. (ina)